



E-ISSN: 2723-3731

Jawa Dwipa
Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu
Volume 6 Nomor 1 Juni 2025

PEDAGOGI NIR-KEKERASAN DALAM PANDANGAN MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh:

Gede Agus Siswadi¹, I Dewa Ayu Puspawati²

STAHN Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah

Email: gedeagussiswadi@gmail.com¹, dewaayu1012@gmail.com²

ABSTRACT

This research examines the concept of non-violent pedagogy in the view of Mohandas Karamchand Gandhi and its relevance for the development of character education. Gandhi viewed non-violent pedagogy as an essential foundation in building individuals who are not only intellectually intelligent, but also have high morality. This concept emphasises the importance of education as a means to strengthen human values, such as honesty, justice and empathy. This research uses a descriptive-analytical approach by analysing Gandhi's writings and thoughts on education and non-violence. The results of this study show that Mohandas Karamchand Gandhi's thoughts have a deep relevance to the development of character education, especially in the context of moral and spiritual values. One of Gandhi's main contributions is the concept of non-violent pedagogy or ahimsa, which emphasises the rejection of violence in all its forms. Gandhi also taught the concepts of satyagraha, aparigraha, brahmacharya, asteya, and swadesi, a concept that directs individuals to always serve the truth, then become a simple individual and not too pursue luxury, always control themselves, do not take the property of others, and also teach the principle of independence.

Keywords: Pedagogy, Nonviolence, Mahatma Gandhi, Character.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep pedagogi nir-kekerasan dalam pandangan Mohandas Karamchand Gandhi dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Gandhi memandang pedagogi nir-kekerasan sebagai landasan esensial dalam membangun individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menganalisis berbagai tulisan dan pemikiran Gandhi tentang pendidikan dan nir-kekerasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Mohandas Karamchand Gandhi memiliki relevansi yang mendalam terhadap pengembangan pendidikan karakter, terutama dalam konteks nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu kontribusi utama Gandhi adalah konsep pedagogi nir-kekerasan atau

ahimsa, yang menekankan penolakan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya. Gandhi juga mengajarkan konsep *satyagraha*, *aparigraha*, *brahmacarya*, *asteya*, dan *swadesi* yakni sebuah konsep yang mengarahkan individu untuk selalu mengabdikan pada kebenaran, kemudian menjadi individu yang sederhana serta tidak terlalu mengejar kemewahan, selalu mengendalikan diri, tidak mengambil hak milik orang lain, dan juga mengajarkan prinsip kemandirian.

Kata Kunci: Pedagogi, Nir-Kekerasan, Mahatma Gandhi, Karakter.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi ini mencakup berbagai aspek seperti intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (Siswadi, 2024). Melalui pendidikan, individu diharapkan dapat mengenali dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat (Siswadi, 2023a). Proses ini melibatkan berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan lainnya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Selain mengembangkan potensi, pendidikan juga bertujuan untuk memanusiakan manusia. Hal ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan beretika. Dalam proses ini, nilai-nilai seperti kejujuran, empati, kerja sama, dan tanggung jawab diajarkan dan diinternalisasikan sehingga individu dapat hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam.

Merujuk dari pernyataan tersebut di atas, oleh karenanya proses pendidikan semestinya dijalankan dengan orientasi pada pencapaian potensi manusia secara maksimal. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dimana setiap aspek perkembangan individu harus diperhatikan. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan bakat unik setiap individu, serta menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya individu (Siswadi, 2021). Dengan cara ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi tertingginya. Selain itu, hal yang menjadi poin penting juga adalah berkaitan dengan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang juga merupakan tujuan penting dari pendidikan. Dengan mendidik individu untuk menjadi manusia yang utuh, pendidikan membantu menjaga, memelihara, dan mewujudkan kemuliaan ini dalam kehidupan nyata. Proses pendidikan yang baik harus mampu membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam, serta mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam membentuk manusia yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

Pendidikan semestinya menjadi wadah untuk memanusiakan manusia, menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkembang secara menyeluruh dan seimbang (Humaeroh et al., 2021). Namun, realitas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan masih sering terjadi dalam pendidikan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk dari sesama siswa (*bullying*), guru, atau bahkan sistem pendidikan itu sendiri yang seringkali terlalu menekankan pada prestasi akademis tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional siswa (Siswadi, 2022c). Ketika pendidikan menjadi ajang kekerasan dan tekanan, esensi kemanusiaan dalam pendidikan terdegradasi, mengakibatkan dampak negatif pada perkembangan karakter dan potensi siswa (Djamal, 2016). Kekerasan dalam pendidikan tidak hanya merusak pengalaman belajar, tetapi juga melanggar prinsip dasar bahwa pendidikan harus memuliakan manusia, menjadikan setiap individu merasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat (Rosmawati et al., 2021). Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar memanusiakan, diperlukan upaya sistemik untuk menghapus segala bentuk kekerasan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia secara holistik.

Pendidikan nir-kekerasan, atau pendidikan yang berwawasan damai, hanya dapat dicapai jika konsep pendidikan nilai dikembangkan secara efektif dan holistik. Pendidikan nilai bertujuan untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarahkan perilaku siswa ke arah yang positif, menjauhkan anak dari kekerasan dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, pendidikan harus mencakup tujuan yang jelas untuk membentuk karakter siswa yang damai dan menghargai keberagaman, serta mendorong perilaku yang menghormati hak-hak dan martabat setiap individu. Tujuan pendidikan yang demikian tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang mampu menciptakan dan memelihara perdamaian dalam interaksi sosial.

Pedagogi nir-kekerasan, atau pendidikan tanpa kekerasan, merupakan konsep yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kasih sayang dalam proses pendidikan. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks upaya untuk mengembangkan pendidikan karakter yang holistik dan berkelanjutan. Berbicara tentang nir-kekerasan maka sangat lekat sekali dengan seorang nama Mohandas Karamchand Gandhi, seorang tokoh besar dalam

sejarah perjuangan tanpa kekerasan yang menawarkan pandangan mendalam mengenai pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip nir-kekerasan dalam pendidikan. Pandangan Gandhi mengenai pedagogi nir-kekerasan menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moralitas individu agar dapat hidup harmonis dengan sesama dan juga alam.

Gandhi percaya bahwa pendidikan yang benar harus mampu menanamkan nilai-nilai kebenaran (*satya*) dan tanpa kekerasan (*ahimsa*) dalam setiap individu (M. Gandhi, 1965). Menurutny, pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan moral dan etika, serta kemampuan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat (M. K. Gandhi, 1988). Dalam pandangan Gandhi, pendidikan nir-kekerasan bukan hanya metode, tetapi juga filosofi yang mencakup keseluruhan proses pembelajaran, termasuk hubungan antara guru dan siswa, pendekatan pengajaran, serta lingkungan belajar yang damai dan menghormati martabat setiap individu (Cenkner, 1976).

Relevansi pedagogi nir-kekerasan dalam pengembangan pendidikan karakter menjadi semakin penting di tengah maraknya berbagai bentuk kekerasan dalam sistem pendidikan modern. Kekerasan ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal, psikologis, dan struktural, yang sering kali menghambat perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip nir-kekerasan dalam pendidikan dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan karakter yang kuat dan berintegritas. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Mohandas Karamchand Gandhi tentang pedagogi nir-kekerasan dan mengkaji relevansinya dalam konteks pengembangan pendidikan karakter. Dengan mengadopsi pendekatan yang diajukan oleh Gandhi, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi praktis yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data dari studi kepustakaan (Siswadi, 2022b). Sumber data primer penelitian ini berasal dari karya-karya Mohandas Karamchand Gandhi, yang menjadi titik sentral untuk memahami konsep pedagogi nir-kekerasan dan relevansinya dalam pendidikan karakter. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari karya ilmiah dan literatur yang relevan dengan

konteks penelitian ini, yang mendukung pemahaman lebih lanjut tentang aplikasi nilai-nilai moral Gandhi dalam konteks pendidikan. Analisis data dilakukan menggunakan pola analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi, data koleksi, reduksi data, display data, dan penyimpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Gandhi dan sumbangsihnya terhadap pengembangan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.

III. PEMBAHASAN

3.1 Biografi Mohandas Karamchand Gandhi dan Pemikirannya

Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, sebuah kota kecil di wilayah Kathiawar, India Barat, yang kini dikenal juga sebagai Sudamapuri (Siswadi, 2022a). Porbandar adalah kota pesisir di negara bagian Gujarat, dan pada masa itu merupakan bagian dari kerajaan kecil yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Gandhi, yang kelak dikenal sebagai Mahatma, lahir dalam keluarga Hindu dari kasta Modh Bania, sebuah kelompok sosial yang secara tradisional terlibat dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Lingkungan keluarga dan masyarakat tempat Gandhi tumbuh memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar yang kemudian mempengaruhi seluruh perjuangannya. Ayah Gandhi, bernama Karamchand Uttamchand Gandhi, atau lebih dikenal sebagai Kaba Gandhi, adalah seorang pejabat pemerintah di kerajaan lokal Porbandar. Sebagai Perdana Menteri di kerajaan itu, Kaba Gandhi memiliki reputasi sebagai administrator yang jujur dan tegas. Ibu Gandhi bernama Putlibai, dikenal sangat religius dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan spiritual Gandhi sejak masa kanak-kanak (Tendulkar, 1952).

Meskipun berasal dari keluarga yang berkecukupan, Gandhi menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Kesederhanaan ini tercermin dalam kebiasaannya sehari-hari dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya, yang menekankan pada pengendalian diri, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Lingkungan keluarga yang mengutamakan etika dan moralitas di atas materi turut membentuk pandangan Gandhi tentang kehidupan dan perjuangan sosial. Nilai-nilai kesederhanaan, pengorbanan, dan pelayanan kepada sesama menjadi pilar utama dalam filosofi hidupnya, yang kelak tercermin dalam gerakan tanpa kekerasan yang dipimpinnya untuk melawan penindasan dan ketidakadilan (Tendulkar, 1952).

Gandhi, meskipun dikenal sebagai pemimpin besar dan bapak bangsa India, tidaklah lahir sebagai seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa atau keunggulan intelektual yang menonjol. Sejak kecil, Gandhi tidak terlalu menonjol dalam hal prestasi akademis, bahkan Gandhi sering mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam matematika dasar. Meskipun begitu, Gandhi memiliki semangat belajar yang kuat dan ketekunan yang tinggi (Siswadi, 2022a). Ketekunan ini menjadi prinsip utama dalam pendidikan dan pengembangan dirinya sejak usia dini. Pada usia 12 tahun, Gandhi melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah, di mana Gandhi terus menunjukkan sifat pemalu, lugu, dan jujur. Gandhi tidak aktif dalam bergaul dengan teman-teman sebayanya, tetapi lebih memilih ketenangan dengan menemani dirinya sendiri dengan buku-buku. Kebiasaan ini mencerminkan fokusnya yang kuat pada pendidikan. Gandhi sering mengulang-ulang pelajaran yang telah diajarkan di sekolah, menunjukkan dedikasinya untuk memahami materi secara mendalam meskipun menghadapi kesulitan.

Selama masa sekolahnya, Gandhi dikenal sebagai anak yang konsisten dan disiplin. Setiap hari, Gandhi hanya pergi ke sekolah pada waktu yang ditentukan, dan pulang tepat setelah pelajaran selesai (Fischer, 1967). Ketidaktergesaannya dalam proses belajar menunjukkan sikapnya yang tenang dan terfokus dalam mengejar ilmu pengetahuan. Meskipun tidak menonjol dalam hal sosial atau kemampuan akademis, kehidupan Gandhi di sekolah mencerminkan komitmen dan ketekunan yang mengarah pada nilai-nilai inti yang kemudian membentuk kepemimpinannya dalam gerakan perubahan sosial di India. Gandhi juga terkenal karena kemampuannya untuk belajar dari pengalaman sehari-hari dan refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai moral dan etika. Pengalaman masa kecilnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan integritas dan kesederhanaan telah memberikan fondasi kuat bagi filosofi hidupnya yang kemudian terkenal dalam gerakan *Satyagraha* dan *Ahimsa*.

Pada tahun 1887, setelah berhasil lulus ujian matrikulasi dari Universitas Bombay, Gandhi kemudian melanjutkan pendidikannya di Samaldas College di Bhavnagar. Meskipun berhasil masuk ke perguruan tinggi tersebut, Gandhi merasa tidak puas dengan situasi pendidikan yang dihadapi. Terinspirasi oleh cita-citanya untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut di Inggris, Gandhi mulai mencari informasi tentang bagaimana mewujudkan impian tersebut. Namun, cita-cita Gandhi untuk melanjutkan studi ke Inggris tidak diterima dengan mudah oleh keluarganya, terutama oleh ibunya, yang mengkhawatirkan dampak dari perubahan lingkungan yang drastis bagi Gandhi. Meskipun demikian, Gandhi tetap teguh pada pendiriannya dan bertekad untuk

membuktikan bahwa kekhawatiran keluarganya tidak beralasan. Gandhi bahkan membuat sumpah untuk tidak menyentuh wanita, tidak mengonsumsi alkohol (anggur), dan tidak makan daging selama tinggal di Inggris, sebagai bagian dari komitmen spiritual dan moralnya yang semakin berkembang pada waktu itu (M. K. Gandhi, 1982).

Pada tahun 1889, Gandhi tiba di Inggris untuk mengejar studi ilmu hukum. Meskipun tujuannya utama adalah belajar hukum, Gandhi tidak terpaku hanya pada bidang tersebut selama tinggal di Inggris. Kehidupannya yang terbiasa dengan buku membuatnya terus mengeksplorasi literatur yang beragam. Selama di sana, Gandhi membaca Alkitab, terutama Perjanjian Baru, yang memperdalam pemahamannya tentang nilai-nilai keagamaan Kristen. Selain itu, Gandhi juga terkesan mendalam oleh *Bhagavadgita* dalam terjemahan Sir Edwin Arnold, yang mengantarkannya pada pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran-ajaran Hindu. Di Inggris, Gandhi juga merenungkan tentang kurangnya pendidikan agama yang diterimanya selama masa kecil di India. Gandhi menyadari pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dari pembentukan moral dan spiritual seseorang, yang diyakininya dapat mengisi kekosongan dalam pendidikan yang diterimanya di masa muda. Selama tinggal di Inggris, Gandhi juga menghadapi tantangan pribadi, seperti kecenderungan neurotiknya ketika berbicara tentang hal-hal seksual dan ketika menjelaskan pilihannya untuk hidup sebagai vegetarian di hadapan perempuan. Meskipun fasih berbahasa Inggris, Gandhi sering merasa bingung dan malu ketika berpidato, menunjukkan sisi kerentanannya meskipun dihadapkan pada keadaan yang asing dan berbeda (M. K. Gandhi, 1982).

Setelah berhasil lulus ujian ilmu hukum dan memperoleh gelar sebagai seorang pengacara profesional, Gandhi diakui secara resmi atas keahliannya dengan ijazah yang diperolehnya. Meskipun demikian, dalam hati Gandhi merasa bahwa studi hukum bukanlah bidang yang benar-benar cocok baginya. Namun, Gandhi merasa berkewajiban untuk kembali ke India sebagai seorang pengacara yang dilatih di Inggris, sebuah citra yang diharapkan oleh masyarakat pada waktu itu. Setelah kembali ke India pada bulan Juli 1891, Gandhi mulai berpraktik sebagai pengacara, namun Gandhi merasa tidak terlalu sukses dalam bidang ini. Kemudian, Gandhi memutuskan untuk mengajar paruh waktu di Bombay High School. Kehadirannya di sekolah ini tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, tetapi juga membantunya merenungkan lebih dalam tentang peran pendidikan dalam masyarakat India. Pada saat yang bersamaan, Gandhi juga mendapat tawaran menarik dari sebuah perusahaan India di Natal, Afrika Selatan, untuk membela

kepentingan para pekerja India yang menghadapi diskriminasi rasial dan upah yang tidak memadai di sana. Tawaran ini menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya, membawanya ke Afrika Selatan di mana perjuangan melawan ketidakadilan dan penderitaan manusia menjadi bagian sentral dari misinya sebagai seorang pemimpin sosial dan politik (M. K. Gandhi, 1982).

Ajaran Gandhi menekankan enam kebajikan tertinggi yang diilhami oleh filsafat India, yang meliputi *Ahimsa* (tanpa kekerasan), *Satyagraha* (selalu berdasarkan pada kebenaran), *Brahmacarya* (pengendalian diri), *Asteya* (tidak mencuri), *Aparigraha* (tidak serakah), dan *Abhaya* (tidak takut) (Richards, 1985). Konsep *Ahimsa*, yang memiliki akar dalam ajaran *Upanisad*, *Buddhisme*, dan *Jainisme*, sangat memengaruhi pandangan Gandhi. Bagi *Jainisme*, *Ahimsa* diinterpretasikan secara radikal sebagai larangan untuk membunuh atau melukai semua bentuk kehidupan. Gandhi mengadopsi pendekatan *Jainisme* ini, serta percaya bahwa menghentikan kekerasan adalah tujuan yang mulia dan mendasar dalam perjuangan kebenaran (Cherruvallath, 1979). Bagi Gandhi, *Ahimsa* bukan sekadar menahan diri dari tindakan fisik yang merugikan, tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis dan moral dalam mencari kebenaran. Baginya, *Ahimsa* adalah prinsip yang sangat luas dan mendalam, yang menyatakan bahwa perjuangan untuk kebenaran harus selalu dijalani dengan cara yang tidak melibatkan kekerasan atau penghancuran. Gandhi berpendapat bahwa menggunakan *Ahimsa* untuk menyerang atau merendahkan individu tidak konsisten dengan prinsip-prinsipnya, karena hal itu hanya akan merusak tujuan yang sebenarnya dari perjuangan untuk kebenaran. Oleh karena itu, dalam ajarannya tentang *Ahimsa* dan konsep *Satyagraha*, Gandhi menunjukkan bagaimana kekuatan moral yang kuat dapat digunakan untuk melawan sistem ketidakadilan tanpa merendahkan martabat manusia (Prabhu & Rao, 1945).

Tindakan *Ahimsa*, atau tanpa kekerasan, menurut Gandhi bukanlah prinsip yang bersifat statis, tetapi dinamis dan kontekstual. Dalam menjelaskan hal ini, Gandhi memberikan contoh tentang bagaimana seorang *ahimsais* seharusnya bertindak ketika menghadapi anjing gila yang mengancam keselamatan orang banyak di kampung. Meskipun membunuh adalah tindakan *himsa*, namun Gandhi berpendapat bahwa dalam kasus seperti itu, membunuh anjing tersebut dapat dibenarkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi nyawa orang banyak dan menghentikan penderitaan yang dialami oleh anjing gila tersebut. Gandhi menjelaskan bahwa *Ahimsa* bukanlah alasan untuk menyerahkan orang-orang kepada bahaya atau kejahatan. Sebagai kebajikan tertinggi, *Ahimsa* bukan hanya tentang menahan diri dari kekerasan fisik, tetapi juga

mengharuskan individu untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan pertimbangan moral terhadap konteks yang dihadapi (Wegig, 1986).

Selanjutnya adalah *Satyagraha* yakni konsep yang berasal dari bahasa Sanskerta, *satya* (kebenaran) dan *agraha* (keteguhan). Dalam ajaran Gandhi, *Satyagraha* menggambarkan jalan hidup yang berpegang teguh pada kebenaran. *Satyagraha* bukan hanya metode perjuangan melawan penindasan, tetapi juga filosofi hidup yang bertujuan untuk menghadapi kekuatan yang dominan tanpa kekerasan. Gandhi mengembangkan konsep ini sebagai upaya untuk melawan kekuatan kolonial *Anglo-Saxon* yang memiliki kekuatan militer superior dengan cara yang memanfaatkan kekuatan moral dan spiritual. Dengan *Satyagraha*, Gandhi percaya bahwa kekuatan kebenaran dapat mengatasi ketidakadilan tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan, mempromosikan perjuangan yang penuh dengan kekuatan jiwa dan moral (Datta, 1953).

Gandhi menegaskan bahwa kejahatan tidak harus dilawan dengan kejahatan, tetapi dengan keteguhan jiwa yang muncul dari pengendalian diri, keberanian berkorban, cinta kasih, dan penerapan *ahimsa* (tanpa kekerasan) (Bose, 1968). *Satyagraha* menuntut kemampuan untuk mengendalikan diri dan menunjukkan cinta terhadap semua makhluk, yang mencakup tindakan-tindakan seperti puasa sebagai sarana untuk melatih fisik dan batin. Namun, bagi Gandhi, pencarian kebenaran tidak berarti mengasingkan diri dari urusan duniawi atau masyarakat. Sebaliknya, jalan kebenaran berarti pengabdian penuh kasih kepada umat manusia, dengan terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Gandhi mengajarkan bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditemukan melalui keterlibatan langsung dengan orang lain, menyatakan bahwa pengasingan diri tidak akan membawa seseorang kepada pemahaman penuh tentang kebenaran dan keadilan dalam dunia nyata.

Selanjutnya adalah *Brahmacarya* dalam ajaran Gandhi secara harfiah berarti tingkah laku yang menuntun seseorang kepada Tuhan. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang menggabungkan kata *Brahman* (Tuhan, Kebenaran Tertinggi) dengan “*carya*” (perilaku, praktik). Secara teknis, *Brahmacarya* berarti pengekangan diri, terutama dalam hal penguasaan atau pengendalian organ seks. Bagi Gandhi, *Brahmacarya* melampaui pengendalian seksual. Hal tersebut mencakup disiplin diri secara keseluruhan yang memungkinkan individu untuk fokus pada pencapaian spiritual dan moral tertinggi. Pengendalian diri ini dianggap penting untuk mencapai kemurnian hati dan pikiran, yang pada gilirannya memfasilitasi kedekatan dengan Tuhan. Gandhi memandang *Brahmacarya* sebagai esensi dari kehidupan yang berintegritas dan spiritual.

Menurutnya, *Brahmacarya* yang sempurna adalah keadaan di mana individu tidak memiliki dosa, karena hidup dalam kedekatan dan harmoni dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti seseorang harus menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan tindakan, pikiran, dan niat, serta memastikan bahwa semuanya selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral (Wegig, 1986).

Berikutnya adalah *Aparigraha*, dalam ajaran Gandhi berarti non-kepemilikan atau sikap tanpa keterikatan pada harta benda (Datta, 1953). Dalam pengertian yang ekstrem, *aparigraha* mengajak individu untuk memberikan harta bendanya kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan. Gandhi menekankan bahwa harta benda yang dimiliki manusia seharusnya digunakan untuk pengabdian kepada Tuhan, yang diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama manusia. Hal ini tidak berarti bahwa manusia tidak boleh memiliki harta benda, tetapi harta tersebut harus dilihat sebagai alat untuk melayani Tuhan dan masyarakat, bukan untuk kepuasan pribadi atau akumulasi kekayaan yang berlebihan. Melalui *aparigraha*, Gandhi mengajarkan bahwa kepemilikan materi harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama, bukan tujuan akhir itu sendiri (Alappatt, 2005). Implikasi nyata dari *aparigraha* dalam tatanan sosial adalah tercukupinya kebutuhan dasar setiap orang, karena sumber daya digunakan dan didistribusikan dengan cara yang mendukung kesejahteraan bersama. Gandhi percaya bahwa melalui pengurangan keterikatan pada materi dan penerapan *aparigraha*, masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis, di mana tidak ada yang kekurangan dan setiap orang dapat hidup dengan sejahtera.

Ajaran Gandhi selanjutnya adalah *Asteya*, yang berarti tidak mencuri, sebagai prinsip dasar dalam menentukan hak milik seseorang (Datta, 1953). Prinsip ini menuntut agar setiap individu menghormati kepemilikan orang lain dan tidak mengambil apa yang bukan haknya. Gandhi menerima pandangan dari *Jainisme* yang menyatakan bahwa mencuri dari seseorang adalah sama dengan merampas seluruh kehidupannya, karena kepemilikan materi adalah bagian integral dari kesejahteraan individu. Meskipun manusia tidak mungkin hidup tanpa memiliki apapun, tindakan mencuri dianggap merusak tatanan sosial dan moral. Oleh karena itu, adalah kewajiban setiap individu untuk tidak mencuri harta benda orang lain dan menghormati hak miliknya sebagai wujud dari etika sosial yang lebih tinggi. Selain *Asteya*, Gandhi juga mengajarkan *Abhaya*, yaitu membebaskan diri dari semua rasa takut, termasuk takut akan mati, rasa lapar, penganiayaan, murka, dan ketidakpastian lainnya. Menurut Gandhi, keberanian yang dituntut di sini adalah keberanian untuk hidup dengan prinsip moral yang kuat dan tetap teguh dalam menghadapi

penderitaan atau ancaman tanpa menyerah pada ketakutan (Wegig, 1986). Keberanian ini mencakup kemampuan untuk berkorban, bersabar, dan menjalankan tindakan yang penuh kasih dan tanpa kekerasan terhadap semua makhluk. Gandhi percaya bahwa dengan mengatasi rasa takut dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral, individu dapat mencapai ketenangan batin dan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, serta berkontribusi pada tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis.

Kemudian, ajaran Gandhi dalam bidang nasionalisme dan politik terwujud melalui konsep *Swadeshi*, yang berarti mencintai dan mendukung produk-produk dalam negeri. *Swadeshi* adalah bagian integral dari perjuangan Gandhi melawan kolonialisme Inggris di India, dan merupakan program yang mengajak masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor serta mempromosikan produksi dan konsumsi barang-barang lokal (Unhitan, 1979). Dengan gerakan *Swadeshi*, Gandhi mendorong orang India untuk menggunakan pakaian buatan sendiri dan barang-barang lainnya yang dihasilkan oleh industri lokal, sehingga memperkuat ekonomi dalam negeri dan mengurangi dominasi ekonomi asing. Gandhi percaya bahwa dengan memboikot produk-produk asing, rakyat India dapat membangun kemandirian ekonomi dan menghidupkan kembali industri tradisional yang telah tertindas oleh kebijakan kolonial. Gerakan *Swadeshi* juga berfungsi sebagai strategi politik untuk melemahkan kekuasaan kolonial Inggris dengan mengurangi permintaan terhadap produk-produk impor yang diproduksi oleh Inggris. Gandhi menekankan bahwa *Swadeshi* bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang membangun rasa harga diri nasional dan identitas budaya yang kuat.

3.2 Pedagogi Nir-Kekerasan dalam Pandangan Mohandas Karamchand Gandhi

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki berbagai definisi yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Secara umum, kekerasan dipahami sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian atau bahaya, baik yang bersifat fisik maupun emosional, terhadap individu atau kelompok (Djamal, 2016). Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemaksaan, intimidasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Istilah “*abuse*”, yang sering diterjemahkan menjadi “kekerasan”, “penganiayaan”, “penyiksaan”, atau “perlakuan salah”. Kekerasan dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dalam berbagai bentuk seperti kerugian fisik, kerugian psikologis, dan kerugian finansial. Kerugian fisik mencakup segala bentuk cedera atau dampak negatif pada tubuh seseorang, mulai dari luka ringan hingga cedera yang

mengancam nyawa. Kerugian psikologis melibatkan dampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang, seperti trauma, stres, atau gangguan kecemasan yang bisa bertahan lama setelah kejadian kekerasan. Selain itu, kerugian finansial juga sering terjadi sebagai akibat kekerasan, misalnya melalui kehilangan pekerjaan, biaya medis, atau kerusakan properti. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya melibatkan tindakan langsung yang melukai tubuh, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang luas dan mendalam pada kesejahteraan mental dan kehidupan sosial korban.

Kekerasan dalam pendidikan sering kali muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama yang bersifat fisik. Dalam lingkungan pendidikan, ketika seorang murid melakukan pelanggaran, respons yang diberikan oleh pihak yang berwenang, seperti guru sering kali berupa sanksi untuk menegakkan disiplin (Siswadi, 2022c). Namun, masalah timbul ketika sanksi yang diberikan melebihi batas atau tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketika hukuman fisik digunakan sebagai metode disiplin, risiko kekerasan meningkat, terutama jika hukuman tersebut diterapkan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Hukuman fisik seperti menampar, memukul, atau tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh guru terhadap murid adalah contoh nyata dari kekerasan dalam pendidikan.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melampaui batasan disiplin yang wajar, tetapi juga melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Kekerasan semacam ini bisa meninggalkan bekas yang mendalam pada korban, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat mempengaruhi perkembangannya dalam jangka panjang. Penggunaan hukuman fisik juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan penuh ketakutan, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan untuk menciptakan tempat yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembelajaran (Siswadi, 2023b). Lebih jauh lagi, penerapan sanksi fisik yang tidak proporsional atau berlebihan menunjukkan kegagalan dalam memahami dan menerapkan pendekatan disiplin yang positif dan konstruktif. Pendekatan seperti itu seharusnya berfokus pada pemahaman, dan pembangunan karakter tanpa perlu menggunakan kekerasan. Ketika kekerasan menjadi alat untuk menegakkan disiplin, pesan yang disampaikan adalah bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan masalah, yang pada gilirannya dapat melanggengkan siklus kekerasan di dalam dan di luar lingkungan pendidikan.

Selanjutnya, kekerasan dalam pendidikan sering kali dipicu oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Ketika kurikulum pendidikan terlalu berfokus pada aspek kognitif, seperti prestasi akademik dan pencapaian intelektual, sementara mengabaikan pendidikan afektif yang mencakup pengembangan emosional, moral, dan sosial siswa, humanisasi dalam proses pendidikan berkurang secara signifikan (Siswadi, 2023c). Sistem pendidikan yang tidak seimbang ini cenderung menghasilkan tekanan bagi siswa dan pendidik untuk mencapai standar akademik tertentu, seringkali tanpa memperhatikan kesejahteraan emosional dan kebutuhan perkembangan holistik siswa. Akibatnya, pendekatan disiplin yang kaku dan hukuman fisik menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah perilaku atau kegagalan akademik, yang sebenarnya mencerminkan kegagalan dalam memahami dan mendukung perkembangan manusia secara menyeluruh. Karena, ketika sistem pendidikan dan kebijakan lebih menekankan pada hasil kognitif tanpa mempertimbangkan aspek afektif, hubungan antara guru dan siswa dapat menjadi transaksional dan mekanis, bukan mendidik dan mendukung.

Selain kekerasan dalam pendidikan yang nampak berupa verbal maupun fisik, namun terdapat juga kekerasan simbolik yang merupakan bentuk kekerasan yang tidak kasat mata namun memiliki dampak yang signifikan dalam konteks pendidikan (Widyastuti, 2020). Kekerasan simbolik terjadi ketika nilai-nilai, norma, atau pola perilaku tertentu secara tidak langsung diterapkan atau dipaksakan kepada individu atau kelompok dalam sebuah lingkungan pendidikan (Martono, 2012). Hal ini dapat terjadi melalui stigmatisasi, diskriminasi, atau stereotipe yang merendahkan martabat seseorang, meskipun tidak ada tindakan fisik yang dilakukan secara langsung. Contoh dari kekerasan simbolik dalam pendidikan termasuk penolakan terhadap ide-ide atau budaya tertentu, pengucilan sosial terhadap kelompok minoritas, atau bahkan pendekatan pengajaran yang tidak sensitif terhadap kebutuhan kultural siswa. Kekerasan simbolik memiliki potensi besar untuk menjadi penghalang dalam proses humanisasi pendidikan. Ketika individu atau kelompok merasa tidak dihargai atau tidak diakui secara adil dalam lingkungan belajar, hal ini dapat menghambat perkembangan emosional, intelektual, dan sosial siswa.

Menurut Gandhi, praktik kekerasan terhadap anak-anak pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia dan hak asasi manusia. Gandhi sangat menekankan nilai-nilai seperti *ahimsa* (tanpa kekerasan) dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan terhadap anak-anak (Merton, 1992). Bagi Gandhi, anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih

sayang, dan bebas dari bentuk-bentuk kekerasan. Gandhi menolak keras praktik kekerasan terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Bagi Gandhi, hukuman fisik atau penggunaan kekerasan sebagai metode pendidikan tidak hanya tidak efektif namun juga bertentangan dengan nilai-nilai moral. Gandhi percaya bahwa pendidikan haruslah berlandaskan pada kasih sayang, pengertian, dan pengembangan secara holistik terhadap potensi anak-anak, bukan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan sebagai bentuk kontrol. Gandhi memandang bahwa menjaga kemerdekaan dan hak asasi anak-anak berarti memberikan anak tersebut ruang untuk mengeksplorasi dunia, belajar dari kesalahan, dan tumbuh menjadi individu yang berempati dan bertanggung jawab.

Gandhi memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan unik karena Gandhi meyakini bahwa manusia tidak hanya terdiri dari tubuh semata, tetapi juga memiliki roh, akal budi, dan perasaan. Pandangan ini tercermin dalam keyakinannya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan kesadaran dan kehendak yang baik. Bagi Gandhi, manusia memiliki potensi besar untuk berbuat baik dan membawa perubahan positif dalam dunia ini. Dalam pandangan Gandhi, cinta adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Cinta bukan hanya sebagai perasaan atau emosi, tetapi sebagai kekuatan yang mampu menyatukan dan mengubah. Gandhi percaya bahwa melalui cinta, manusia dapat mengembangkan dirinya sendiri dan membangun persatuan yang sejati antara seluruh umat manusia. Dengan mencintai sesama dan alam semesta, manusia dapat memperbaiki diri dan mencapai kesempurnaan sebagai individu (Siswadi, 2022a).

Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, pandangan Gandhi ini memiliki implikasi yang mendalam. Gandhi percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan emosional siswa. Pendidikan yang sejati akan mengajarkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan empati, serta membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, pendidikan dapat membantu mewujudkan potensi manusia untuk berbuat baik, menyebarkan kedamaian, dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Gandhi mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah proses untuk mengembangkan sifat-sifat terbaik yang ada dalam kepribadian seseorang secara menyeluruh, meliputi akal, tubuh, dan jiwa. Bagi Gandhi, pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual yang dapat diukur dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih pada pembentukan karakter dan moral yang kuat. Kemampuan membaca dan menulis dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan

yang lebih besar dalam pendidikan, yaitu membuka pintu menuju pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

Pedagogi nir-kekerasan atau *nonviolence education* dalam pandangan Gandhi merupakan konsep yang mendasar dalam filsafat dan praktik yang selalu dilakukan oleh Gandhi dengan memandang nir-kekerasan (*ahimsa*) bukan hanya sebagai sebuah taktik politik, tetapi sebagai prinsip moral dan spiritual yang menyeluruh. Bagi Gandhi, *ahimsa* tidak hanya tentang tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga tentang menolak segala bentuk kekerasan baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (Cremers, 1994). Gandhi mengajarkan bahwa pendidikan nir-kekerasan harus dimulai dari dalam diri individu. Hal ini berarti setiap orang harus belajar untuk menguasai dirinya sendiri, mengendalikan emosi, dan bertindak dengan kebijaksanaan dalam setiap situasi. Pendidikan nir-kekerasan mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekerasan atau dominasi atas orang lain, tetapi kekuatan dari dalam diri untuk memahami, menghormati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kebaikan bersama.

Gandhi juga menekankan pentingnya pendidikan nir-kekerasan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Menurutnya, masyarakat yang damai dan harmonis hanya dapat tercapai melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik secara damai. Bagi Gandhi, pendidikan nir-kekerasan bukan hanya relevan dalam konteks politik atau sosial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Gandhi menekankan bahwa setiap interaksi, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas, harus didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan cinta. Gandhi percaya bahwa pendidikan nir-kekerasan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana perdamaian, keadilan, dan harmoni dapat diperjuangkan secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia.

3.3 Relevansi Pemikiran Mohandas Karamchand Gandhi terhadap Pendidikan Karakter

Gandhi pada dasarnya memandang bahwasanya pendidikan merupakan upaya untuk memunculkan sifat-sifat terbaik dari setiap individu. Baginya, sifat terbaik yang harus ditampilkan mencakup menghargai orang lain, membantu sesama manusia, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Gandhi percaya bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis tetapi juga mencakup pengembangan moral dan etika. Seseorang harus memperlakukan manusia lain dengan cara terbaik menurut versinya masing-masing, yang berarti mengakui dan menghormati martabat serta hak-hak

setiap individu. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Gandhi menekankan bahwa pengembangan akal, tubuh, dan jiwa harus dilakukan secara bersamaan dan harmonis. Akal atau pikiran harus diperkaya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk tujuan yang baik. Tubuh perlu dijaga kesehatannya dan dibentuk agar mampu mendukung aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, jiwa atau aspek spiritual harus dikembangkan melalui praktik-praktik moral dan etis yang mengarahkan seseorang pada kehidupan yang benar dan bermakna. Menurut Gandhi, ketiga aspek ini tidak boleh dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Hanya dengan pengembangan yang seimbang dari akal, tubuh, dan jiwa, seseorang dapat mencapai kematangan pribadi dan berkontribusi sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat (M. Gandhi, 1965).

Pembinaan ketiga elemen ini, yaitu akal, tubuh, dan jiwa, harus berjalan seiring dalam proses pendidikan. Gandhi percaya bahwa pendidikan yang efektif harus mampu mengintegrasikan pengembangan intelektual, fisik, dan spiritual dalam setiap individu. Jika salah satu elemen diabaikan, perkembangan individu menjadi tidak seimbang, yang dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, pendidikan menurut Gandhi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau keterampilan praktis semata, tetapi juga pada pembinaan karakter yang utuh, mencakup pengembangan moral, kesehatan fisik, dan kedalaman spiritual. Dengan demikian, pendidikan yang utuh dan seimbang ini akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki hati yang luhur dan jiwa yang kuat, siap untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang benar dan mulia.

Konsep *ahimsa*, atau prinsip nir-kekerasan yang dianut oleh Mahatma Gandhi, memiliki relevansi mendalam dalam pendidikan karakter. Dalam konteks pendidikan, *ahimsa* mengajarkan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Hal ini membantu siswa mengembangkan kepribadian yang harmonis dan penuh empati, mendorong siswa untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dengan menginternalisasi *ahimsa*, siswa diajarkan untuk menolak kekerasan sebagai alat penyelesaian masalah, menggantinya dengan pendekatan yang lebih damai dan konstruktif. Pendidikan karakter yang berlandaskan *ahimsa* membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana rasa hormat, kerjasama, dan kedamaian menjadi nilai-nilai utama yang dipraktikkan setiap hari.

Penerapan *ahimsa* dalam pendidikan karakter berkontribusi pada pengembangan etika interpersonal yang kuat. Siswa diajarkan untuk menjaga kesopanan, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan menghindari perilaku yang merugikan atau menyakiti. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan bahasa yang baik, sikap sopan, dan penolakan terhadap tindakan *bullying* atau pelecehan. *Ahimsa* mendorong siswa untuk menjadi individu yang toleran dan pengertian, mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dengan demikian, *ahimsa* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk membangun hubungan yang sehat dan etis dengan sesama, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Kemudian, dalam skala yang lebih luas, pengajaran *ahimsa* dalam pendidikan karakter dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Siswa yang memahami dan menerapkan *ahimsa* dalam kehidupan sehari-hari cenderung tumbuh menjadi warga negara yang menghargai perdamaian dan berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan (Cenkner, 1976).

Selanjutnya, konsep *satyagraha*, atau selalu mengabdikan pada kebenaran, dalam konteks pendidikan mengajarkan siswa untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan integritas moral, bahkan ketika menghadapi tekanan atau tantangan (Ramanamurti, 1970). Pendidikan yang mengintegrasikan konsep *satyagraha* membantu siswa mengembangkan keberanian moral untuk mengatakan yang benar, bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etis, dan menolak segala bentuk penipuan atau ketidakadilan. Dengan menanamkan nilai-nilai *satyagraha*, siswa diajarkan untuk mempertahankan kebenaran tanpa menggunakan kekerasan, sehingga siswa tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab, mampu menghadapi situasi sulit dengan cara yang jujur dan bermartabat. Kemudian, konsep selanjutnya adalah *brahmacharya*, yang diartikan sebagai pengendalian diri atau hidup dengan disiplin serta merupakan salah satu pilar penting dalam pemikiran Mahatma Gandhi yang sangat relevan dalam pendidikan karakter. Dalam konteks pendidikan, *brahmacharya* mengajarkan pentingnya disiplin diri, pengendalian emosi, dan kemampuan untuk mengatur keinginan serta dorongan internal. Melalui pendidikan karakter yang berlandaskan *brahmacharya*, siswa diajarkan untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan teratur, serta menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritualitas.

Selanjutnya, adalah konsep *aparigraha*, yang berarti tidak melekat pada kekayaan dan hidup dengan kesederhanaan. Dalam konteks pendidikan, *aparigraha* mengajarkan siswa untuk menghindari kecenderungan materialisme dan mengembangkan sikap hidup sederhana. Dengan

menginternalisasi *aparigraha*, siswa belajar menghargai hal-hal esensial dalam hidup dan menolak gaya hidup yang berlebihan. Pendidikan karakter yang berlandaskan *aparigraha* membantu siswa memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan atau kepemilikan materi, tetapi dari kepuasan batin dan kesadaran akan nilai-nilai moral (M. K. Gandhi, 1982). Lebih lanjut, konsep *aparigraha* dalam pendidikan karakter mendorong siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap orang lain. Dengan mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan tidak berlebihan, siswa didorong untuk berbagi dengan individu yang kurang beruntung dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. *Aparigraha* menanamkan sikap saling peduli dan solidaritas, yang penting untuk membentuk masyarakat yang adil dan seimbang.

Kemudian berikutnya adalah konsep *asteya*, atau prinsip tidak mencuri, dan *Swadesi*, atau prinsip menggunakan produk lokal, adalah konsep yang sangat relevan dalam pendidikan karakter. *Asteya* mengajarkan siswa untuk menghormati hak milik orang lain dan menghindari segala bentuk pencurian, baik itu secara fisik maupun intelektual. Dalam konteks pendidikan karakter, *Asteya* mendorong siswa untuk berperilaku jujur dan menghargai hasil kerja orang lain. Hal ini tentunya membangun landasan moral yang kuat, di mana integritas dan kejujuran menjadi nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. *Swadesi*, di sisi lain, mengajarkan siswa untuk mendukung produk lokal. Gandhi percaya bahwa penggunaan produk lokal tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor tetapi juga memperkuat ekonomi lokal serta memelihara budaya dan tradisi yang unik. Dalam pendidikan karakter, *Swadesi* membantu siswa mengembangkan rasa cinta dan kepedulian terhadap produk yang dihasilkan oleh bangsanya sendiri.

IV. SIMPULAN

Pedagogi nir-kekerasan, sebagaimana dipandang oleh Mohandas Karamchand Gandhi, menawarkan pandangan yang mendalam tentang pendidikan karakter yang berkelanjutan. Gandhi mengajarkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan moral dan spiritual yang kuat. Pendekatan ini menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung, penanaman nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan empati, serta penghargaan terhadap keanekaragaman individu. Relevansi pendekatan Gandhi terhadap pengembangan pendidikan karakter modern sangatlah signifikan. Di tengah tantangan moral dan sosial yang kompleks, pendekatan ini menegaskan pentingnya membangun kepribadian yang berakar pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pedagogi

nir-kekerasan, pendidikan karakter dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peduli, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dengan demikian, pandangan Gandhi tentang pendidikan tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dipertimbangkan dalam merancang kurikulum yang holistik dan berorientasi pada pengembangan kepribadian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alappatt, F. (2005). *Mahatma Gandhi: Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Siti Farida dari judul asli: *Welfare in The Gandhinian Economics and in The Welfare State*. Bandung: Nusa Media.
- Bose, N. K. (1968). *Selection From Gandhi*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
- Cenkner, W. (1976). *The Hindu Personality in Education: Tagore, Gandhi, Aurobindo*. New Delhi: Manohar Book Service.
- Chervuvalath, S. V. C. (1979). *Gandhians Non-Violence Compared With The Non-Violence in The Sermon On The Mounth*. Coachin: Mar-Louis Memorial Press.
- Cremers, A. (1994). *Luther dan Gandhi: Telaah Psiko-Historis Erik H. Erikson*. Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Datta, M. D. (1953). *The Philosophy of Gandhi*. USA: University of Wincossin Press.
- Djamal, M. (2016). *Fenomena Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fischer, L. (1967). *Gandhi: Penghidupan dan Pesannya untuk Dunia*. Terjemahan Oesman Effendi. Jakarta: PT Pembangunan.
- Gandhi, M. (1965). *Gandhi on Non-Violence*. New York: Penguin Books New Directions Publishing.
- Gandhi, M. K. (1982). *Gandhi Sebuah Otobiografi: Kisah Eksperimenku dalam Mencari Kebenaran*. Alih Bahasa Gedong Bagus Oka. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gandhi, M. K. (1988). *Semua Manusia Bersaudara, Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakan Sendiri*. Terjemahan Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Gramedia.
- Humaeroh, S., Abdulatif, S., Winarti, & Windayana, H. (2021). Pedagogik Kritis dalam Membangun Pendidikan Humanis. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 174–182.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <http://facebook.com/indonesiapustaka>
- Merton, T. (1992). *Gandhi: Tentang Pantang Kekerasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prabhu, R. K., & Rao, U. R. (1945). *The Mind of Mahatma Gandhi*. London: Oxford University Press.
- Ramanamurti, W. (Ed). (1970). *Gandhi: Essential Writings*. New Delhi: Gandhi Peace Foundation.
- Richards, G. (1985). *The Philosophy of Gandhi: A Study of His Basic Ideas*. London: Curzon Press Ltd.
- Rosmawati, T., Samsaifil, & Wally, I. H. (2021). Kekerasan Simbolik Verbal pada Lingkungan Pendidikan di SMP Negeri 3 Baubau. *JEC (Jurnal Edukasi Cendekia)*, 5(1), 9–16.

- Siswadi, G. A. (2021). Relevansi Pemikiran Filosofis Ki Hadjar Dewantara Terhadap Sistem Pendidikan Hindu. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 1(2), 150–159.
- Siswadi, G. A. (2022a). Filsafat Nir-Kekerasan dalam Perspektif Mohandas Karamchand Gandhi dan Relevansinya dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme di Indonesia. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 5(2), 48–65.
- Siswadi, G. A. (2022b). *Konsep Merdeka Belajar dalam Kurikulum Merdeka ditinjau dari Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya dengan Penguatan Karakter Pelajar Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Siswadi, G. A. (2022c). Relasi Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pandangan Paulo Freire (1921-1997) (Suatu Telaah Filosofis sebagai Upaya Menghindari Praktik Kekerasan Simbolik dalam Dunia Pendidikan). *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 3(1), 86–100.
- Siswadi, G. A. (2023a). Konsep Kebebasan dalam Pendidikan Perspektif Rabindranath Tagore dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(02), 97-108, 2(02), 97–108. <https://doi.org/10.53977/ps.v2i01.809>
- Siswadi, G. A. (2023b). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar*. Badung: Nilacakra.
- Siswadi, G. A. (2023c). *Ragam Persoalan Pendidikan di Indonesia dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan*. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 5(1), 20-36.
- Siswadi, G. A. (2024). *Sekolah Bukan Mesin Pencetak Manusia Pekerja*. Kota Solok Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Tendulkar, D. G. (1952). *Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi*. Bombay: Vithalba K. Jhaveri.
- Unhitan, T. N. K. (1979). *Gandhi Social Change*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
- Wegig, W. (1986). *Dimensi Etis Ajaran Gandhi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widyastuti, N. (2020). Praktik Kekerasan Simbolik dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(1), 2354–7693.